

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Pemkab Kepulauan Seribu Bentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan

Palmerah, Warta Kota

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu berupaya mendata angka kemiskinan penduduk di pulau-pulau permukiman.

Ke depannya, Kabupaten Kepulauan Seribu akan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).

Wakil Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan mengatakan, nantinya pembentukan TKPK Kabupaten Kepulauan Seribu akan melibatkan SKPD/UKPD terkait.

"Ini untuk kegiatan yang akan diselenggarakan pada akhir September mendatang," ucap Fadjar, Kamis (31/8/2023).

Rencana pendataan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Seribu dimatangkan dalam Rapat Persiapan Sinkronisasi TKPK hari ini.

Salah satu pembahasan utama dalam rapat bersama ialah memetakan serta mendata angka kemiskinan penduduk.

"Sehingga informasi terkait angka kemiskinan bisa diketahui secara

jelas," kata ucap Fadjar.

Fadjar menilai, pembentukan TKPK Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi langkah konkret untuk mempercepat pengurangan penekanan angka kemiskinan.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Perempuan Sudin PPAPP Kepulauan Seribu Satori menambahkan, pembentukan TKPK Kabupaten Kepulauan Seribu nantinya akan dipaparkan di tingkat nasional.

Pemaparan Ketua TKPK Kabupaten Kepulauan Seribu akan melibatkan narasumber untuk menjabarkan bagaimana kondisi kemiskinan di pulau.

"Dalam rapat ini kita mendengarkan masukan dari SKPD/UKPD terkait. Sehingga pembentukan TKPK Kabupaten Kepulauan Seribu bisa terwujud dan terlibat pada kegiatan akhir September nanti," ucap Satori.

Pengaman Jaring Sosial

Sebelumnya Penjabat Gubernur (Pj) DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuka acara kick off dan high

level meeting konsinyering satu data pembangunan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Heru mengatakan, percepatan kesamaan data karena sangat berkaitan dengan penggunaan anggaran yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024. "Kami Pemprov DKI sangat concern dengan satu data pembangunan ini," katanya, Jumat (25/8/2023).

Nantinya anggaran ini akan diberikan kepada masyarakat sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, Bappenas, dan Kementerian Koordinator.

Heru mengakui, Pemprov DKI memiliki anggaran jaring pengaman sosial yang cukup banyak untuk masyarakat.

Namun, pemberian anggaran ini harus tepat sasaran berdasarkan data yang ada di Pemprov DKI Jakarta.

"Misalnya data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)," tuturnya. (m26/TribunJakarta)